

ABSTRAK

ABDUL AZIS, 2022. PERANAN SULTAN SYARIF HAMID II SEBAGAI KETUA *BIJEENKOMST VOOR FEDERALE OVERLEG* (BFO) DALAM PEMBENTUKAN REPUBLIK INDONESIA SERIKAT TAHUN 1948-1949

Jurusan Pendidikan Sejarah, Fakultas keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Siliwangi.

Syarif Hamid Algadrie merupakan putra sulung dari Kesultanan Qadriyah Pontianak. Lahir pada tanggal 12 Juli 1913. Beliau merupakan ketua dari badan permusyawaratan federal yang disebut dengan nama *Bijeenkomst Federale Overleg* (BFO). Tujuannya untuk membentuk pemerintahan Federal sementara sesuai dengan isi dari perjanjian Linggajati untuk secepatnya menerima kedaulatan dari pemerintahan Belanda tanpa keikutsertaan RI. Sultan Hamid merupakan federalis sejati. Maka usaha yang bertentangan dengan federalis ia tolak. Namun dalam usaha untuk mencapai kemerdekaan terdapat dua kubu yang saling bertentangan yakni Sultan Hamid yang mengikuti rencana Belanda dan Anak Agung yang mengajak Republik bergabung. Sultan Hamid menganggap bahwa melakukan perlawanan dengan Belanda merupakan hal yang sia-sia. Maka merdeka dengan Republik atau tidak harus segera dilakukan penyerahan kedaulatan dari Belanda.

Tujuan penulisan skripsi ini, untuk mengetahui peranan yang dilakukan Sultan Hamid II sebagai ketua *Bijeenkomst Federale Overleg* dalam pembentukan Republik Indonesia Serikat tahun 1948-1949. Ada empat tahap penulisan, heuristik, kritik sumber, Interpretasi dan historiografi. Hasil penelitian ini memandang bahwa sebagai pemimpin BFO. Pada awalnya Sultan Hamid merupakan orang yang dipercaya pemerintahan Belanda untuk memastikan Pemerintahan federal sementara untuk segera terwujud. Namun dalam situasi yang tidak menentu Sultan Hamid tidak mengikuti rencana Belanda, namun Sultan Hamid mengikuti rencana sendiri dengan melakukan pendirian terhadap Resolusi 3 Maret 1949. Usaha yang dilakukan Sultan Hamid ketika itu merestui untuk mengundang perwakilan RI untuk bertukar pikiran sebelum keberangkatan ke Konferensi Meja Bundar. Lalu Ikutserta hadir sebagai ketua delegasi BFO di Konferensi Meja Bundar yang didalamnya menyetujui hasil dari pada KMB tersebut. Pada awalnya Sultan Hamid tidak selalu sepakat dengan Republik, namun pada akhirnya Sultan Hamid ikut membantu RI memperoleh pengakuan kedaulatan bagi Indonesia dan juga bahwa posisi RI tidak akan pernah berubah dalam pandangan Bangsa Indonesia. Namun apa yang dilakukan atas pendiriannya berhasil berperan dalam mendirikan Republik Indonesia Serikat.

Kata Kunci : Sultan Hamid II, *Bijeenkomst Federale Overleg*, RIS

ABSTRACT

ABDUL AZIS, 2022. **ROLE OF SULTAN SYARIF HAMID II AS CHAIRMAN OF BIJEENKOMST VOOR FEDERALE OVERLEG (BFO) IN THE ESTABLISHMENT OF THE REPUBLIC OF UNITED INDONESIA, 1948-1949**

Department of History Education, Faculty of Teacher Training and Education, University Siliwangi.

Syarif Hamid Algadrie is the eldest son of the Pontianak Qadriyah Sultanate. Born on July 12, 1913. He is the chairman of a federal deliberative body called the Bijeekomst Federle Overleg (BFO). The aim was to form a temporary Federal government in accordance with the contents of the Linggajati agreement to immediately accept sovereignty from the Dutch government without the participation of RI. Sultan Hamid was a true federalist. So he refused any attempts against the federalists. However, in the effort to achieve independence, there were two opposing camps, namely Sultan Hamid who followed the Dutch plan and Anak Agung who invited the Republic to join. Sultan Hamid considered that it was futile to fight with the Dutch. So independent with the Republic or not, the transfer of sovereignty from the Netherlands must be carried out immediately.

The purpose of writing this thesis is to find out the role played by Sultan Hamid II as chairman of the Bijeekomst Federale Overleg in the formation of the United States of Indonesia in 1948-1949. There are four stages of writing, heuristics, source criticism, interpretation and historiography. The results of this study view that as a BFO leader. At first Sultan Hamid was the person who was trusted by the Dutch government to ensure that the temporary federal government would soon be realized. However, in an uncertain situation Sultan Hamid did not follow the Dutch plan, but Sultan Hamid followed his own plan by taking a stand against the Resolution 3 March 1949. The efforts made by Sultan Hamid at that time gave his blessing to invite Indonesian representatives to exchange ideas before leaving for the round table conference. Then Participate was present as the head of the BFO delegation at the Round Table Conference in which he agreed to the results of the KMB. At first Sultan Hamid did not always agree with the Republic, but in the end Sultan Hamid helped RI gain recognition of sovereignty for Indonesia and also that RI's position would never change in the eyes of the Indonesian people. However, what he did for his establishment succeeded in playing a role in establishing the Republic of the United States of Indonesia.

Keywords: Sultan Hamid II, Federal Consultation Meeting, RIS